

PERBAIKAN IKLIM BERINVESTASI UNTUK MENINGKATKAN ARUS MASUK NET PENANAMAN MODAL

Dr. Donalson Silalahi

Abstracts

Donalson Silalahi. *From the time that the crisis of economy at the year 1997, the flows of the net capital investment in Indonesia is low or negative for some period. Thus, the Government is difficulty to realized the target of economic growth at the year 2010. The capital investment is the decisive factor that influence economic growth to compare with the other factors. Thus, the capital investment is the important factor to achieved the target of economic growth.*

The role of the capital investment is difficulty to create if the problems of the climate of the capital investment like that bureaucracy, grease money, and the implementation of autonomy area did not to solve immediately.

This paper aims to describes and discuss how to improve the climate of the capital investment to increased the flows of the net capital investment. If the climate of the capital investment in Indonesia to improve, so the flows of the net capital investment is increase and then the economic growth increase too. By the way, the government and the local government necessary to improve the climate of the capital investment with implementation of the policy with to give lots of the facilities, ease to investment, and the incentives to investor with mapping the industry of Indonesia.

Keywords: *The climate of the capital investment, the growth of economy, facilities, ease to investment, and incentives.*

PENDAHULUAN

Semenjak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada akhir tahun 1997-an, salah satu persoalan pokok yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan target pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah kurang tersedianya modal investasi (asing dan domestik). Mengacu pada laporan Asean Development Bank (ADB), tingkat arus masuk net Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia relatif rendah selama tahun 1998 - 2005 dan bahkan negatif selama periode tahun 1998 - 2001 dan tahun 2003. Dengan tingkat arus masuk net Penanaman Modal Asing (PMA) yang relatif rendah dan bahkan negatif untuk beberapa periode waktu, maka sangat sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk menaikkan target pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ke tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi.

Rendahnya arus masuk net Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia dan bahkan negatif pada tahun 1998 - 2001 dan tahun 2003 disebabkan Penanaman Modal Asing (PMA) banyak yang menarik diri atau pindah lokasi ke negara-negara lainnya. Di samping hal tersebut, lambatnya arus masuk net Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia disebabkan Indonesia tidak termasuk lokasi tujuan penting dari perusahaan-perusahaan multi nasional dan juga termasuk negara dengan kinerja penanaman modal asing (PMA) relatif rendah (UNTAC: 2006).

Meskipun Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi, upaya Pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian telah menunjukkan hasil yang positif. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut cenderung didorong oleh konsumsi dan bukan investasi. Hasil review yang dilakukan oleh Silalahi et al. (2009) menunjukkan bahwa investasi telah menjadi faktor yang memainkan peranan utama sebagai penentu tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dibandingkan faktor-faktor lainnya. Oleh karenanya, peranan investasi sangat penting dalam mencapai target pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen tahun 2007, dibutuhkan pertumbuhan investasi sebesar 12 persen dengan nilai investasi sebesar ± Rp 900 triliun (Basar: 2007). Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kerja nasional di Bali menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 - 7,7 persen tahun 2010, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp. 10.000 triliun.

Dana investasi sebesar Rp 10.000 triliun tersebut diharapkan dapat terealisasi pada akhir tahun 2012. Dalam mewujudkan nilai investasi tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program, akan tetapi perlu disadari bahwa pelaksanaan berbagai program dalam mewujudkan nilai investasi merupakan suatu pekerjaan yang cukup berat mengingat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah cukup kompleks. Dewasa ini, berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah, di antaranya adalah: permasalahan yang berhubungan dengan birokrasi, *grease money*, dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi adalah langkah-langkah prosedur dalam membuka usaha baru. Hasil survei yang dilakukan terhadap 124 negara, Indonesia berada di posisi ke 95 sehubungan dengan jumlah prosedur dalam membuka usaha baru (WEF: 2007). Langkah-langkah prosedur berinvestasi mulai dari saat pendaftaran hingga siap beroperasinya kegiatan usaha tersebut membutuhkan 31 langkah kegiatan dengan waktu yang dibutuhkan selama 97 hari pada masa persiapan dan 224 hari pada saat mulai konstruksi hingga siap beroperasi (Word Bank: 2003).

Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam membuka usaha baru di Indonesia, masalah birokrasi cukup kompleks. Oleh karenanya, masalah lingkungan perijinan terus disoroti. Selanjutnya, hasil survei yang dilakukan UNCTAD (2006) menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada dalam papan terbawah nomor 2 dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja investasi. Betapa tidak, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus ijin investasi relatif masih terlalu lama, yakni 151 hari untuk memulai bisnis baru.

Di samping masalah birokrasi, Kuncoro (2005) menunjukkan masih adanya *grease money* dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses *input* menjadi *output*, maupun ekspor. Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perijinan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, kenaikan tarif merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha, terutama yang berorientasi ekspor.

Sejak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diimplementasikan, kebijakan tersebut telah memperburuk iklim berinvestasi di Indonesia (Hofman, et al. 2003). Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro-bisnis diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Kondisi ini menggambarkan relatif tingginya tingkat ketidakpastian dalam berusaha di Indonesia. Lebih lanjut, LPEM (2000) menemukan bahwa alasan utama di balik peningkatan ketidakpastian berusaha berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.

Permasalahan yang berhubungan dengan birokrasi, *grease money*, dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, selain menyebabkan ekonomi biaya tinggi, juga dapat menjadikan daya saing investasi Indonesia di tingkat global menjadi rendah. Menurut World Economic Forum (WEF), pada tahun 2006 - 2007, tingkat daya saing Indonesia berada pada peringkat ke 50 dari 125 negara yang disurvei. Selanjutnya, pada tahun 2007 - 2008, tingkat daya saing Indonesia berada pada peringkat ke 54 dari 131 negara yang survei (Tambunan: 2007).

Kebutuhan dana investasi yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia tentunya merupakan gendang bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit dan efektif dalam menarik investasi. Melalui pertumbuhan investasi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional diharapkan lebih baik sehingga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, pembentukan nilai tambah di berbagai sektor dan pada akhirnya diharapkan akan mampu menggenjot ekspor sehingga terjadi kenaikan devisa yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membayar utang luar negeri.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, tentunya berbagai aspek strategis perlu dilaksanakan jika tidak ingin tertinggal dari negara-negara lain dalam menarik investasi asing maupun domestik. Beberapa aspek yang perlu dicermati dan disempurnakan antara lain adalah reformasi di bidang hukum dan peraturan perundang undangan, sistem insentif ekonomi dan administratif, sistem ketenagakerjaan dan hubungan industrial, ketersediaan sumber daya dan teknologi. Melihat begitu banyaknya aspek-aspek yang perlu dicermati dan disempurnakan, maka dalam tulisan ini akan disoroti tentang perbaikan iklim investasi. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk merumuskan suatu konsep dan model implementatif perbaikan iklim investasi dalam rangka meningkatkan arus masuk net penanaman modal dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi dalam rangka menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno: 1994). Pengeluaran modal dapat berupa mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain serta pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Oleh karenanya, investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh keuntungan di masa depan.

Ekonom klasik mengatakan, bahwa investasi akan dilakukan apabila tingkat pengembalian dari investasi lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Sementara aliran Keynesian mengatakan, pelaksanaan investasi didasarkan pada konsep *marginal efficiency of capital*. Investasi akan dilakukan oleh investor, bila *marginal efficiency of capital* yang diharapkan lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku.

Mengacu dari kedua pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, investasi sangat penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Investasi telah menjadi faktor yang memainkan peranan utama sebagai penentu tingkat pertumbuhan ekonomi, dibandingkan faktor-faktor lainnya. Artinya, investasi memiliki hubungan fungsional dengan pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali dari kehancuran pada masa pemerintahan Orde Lama akibat adanya Penanaman Modal Asing (PMA). Dampak positif dari kehadiran Penanaman Modal Asing (PMA) selama masa era Orde Baru ditunjukkan melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang pesat, yakni rata-rata per tahun antara 7 - 8 persen. Kondisi ini membuat Indonesia termasuk salah satu negara di ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, maka rata-rata pendapatan per kapita naik pesat setiap tahun. Pada tahun 1993, pendapatan per kapita dalam dollar AS sudah melewati angka 800. Tetapi, akibat krisis yang dialami Indonesia, pendapatan per kapita Indonesia menurun drastis ke level 640 dollar tahun 1998 dan 580 dollar AS tahun 1999 (Tambunan: 2006).

Di samping hubungan fungsional antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi, masih terdapat faktor lain yang berpengaruh dalam investasi di Indonesia baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa situasi dan iklim investasi yang kondusif serta faktor eksternal dapat berupa tingkat persaingan, kemudahan berinvestasi dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa melalui perbaikan iklim investasi, maka arus masuk net penanam modal ke Indonesia semakin besar dan dengan demikian tersedia dana investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Kebijakan Perbaikan Iklim Berinvestasi

Nilai investasi dan daya saing Indonesia yang semakin rendah disebabkan oleh banyak hal, salah satu di antaranya adalah iklim investasi yang kurang kondusif. Oleh karenanya, dibutuhkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi. Perbaikan iklim investasi dapat dilakukan melalui kebijakan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, kebijakan reformasi di bidang pelayanan, kebijakan yang berhubungan dengan kepabeanaan dan cukai, ketenagakerjaan, dan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Kebijakan perbaikan kelembagaan dapat dilakukan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang segera dan harus dibuat adalah peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan distorsi investasi yang masih dirasakan oleh investor. Di samping hal tersebut, perlu juga dilakukan sinkronisasi peraturan antara peraturan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai iklim investasi. Sinkronisasi peraturan tersebut sangat diperlukan agar investor lebih mudah memenuhi persyaratan investasi dan sekaligus menghindari ekonomi berbiaya tinggi. Adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah akan meningkatkan efektivitas dan percepatan implementasi kebijakan investasi di level teknisnya (Basar: 2007).

Di samping pembentukan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan reformasi di bidang pelayanan investasi. Kebijakan reformasi di bidang pelayanan investasi dapat berupa penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, transparansi biaya perijinan, dan menjadikan para birokrat menjadi fasilitator bagi dunia bisnis (Kuncoro: 2005). Dewasa ini, perbaikan iklim investasi melalui reformasi pelayanan investasi telah dilakukan dengan dibentuknya lembaga khusus untuk mengurus penanaman modal, seperti: Kantor Pelayanan Satu Atap. Dengan sistem Kantor Pelayanan Satu Atap ini, surat perizinan usaha dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 5 hari hingga satu minggu (Swasembada: 2004). Dewasa ini, banyak pemerintah daerah sangat serius dalam menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan membentuk Kantor Pelayanan Satu Atap, tetapi masih lebih banyak daerah yang belum siap untuk merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga masih terikat dengan kebijakan pemerintah dalam hal penanaman modal. Oleh karenanya, reformasi pelayanan investasi terus dilaksanakan sampai sistem pelayanan satu atap tersebut betul-betul berfungsi sebagaimana diharapkan.

Dalam hal kepabeanaan dan cukai, berbagai kebijakan yang dapat dilakukan untuk perbaikan iklim berinvestasi meliputi: percepatan proses pemeriksaan kepabeanaan sehingga arus barang semakin cepat, pengembangan dan mengefektifkan peranan kawasan berikat, pemberantasan penyeludupan, debirokratisasi di bidang cukai, dan lain sebagainya.

Kebijakan di bidang perpajakan yang dapat dilakukan untuk perbaikan iklim berinvestasi meliputi: pemberian insentif perpajakan untuk investasi, melaksanakan *system self assesment* secara konsisten, perubahan pajak pertambahan nilai untuk mempromosikan ekspor, melindungi hak wajib pajak, mempromosikan transparansi, dan lain sebagainya.

Kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang dapat dilakukan untuk perbaikan iklim investasi meliputi: menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja, penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan, penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan produktif, dan terobosan paradigma pembangunan trans-migrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, berbagai kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan, memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM, mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya.

Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Investasi

Untuk merangsang aktivitas penanam-penanam modal di Indonesia, maka implementasi dari kebijakan perbaikan iklim berinvestasi tersebut dapat dilakukan melalui pemberian berbagai fasilitas, kemudahan, dan insentif kepada investor. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif kepada penanam-penanam modal tentu dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam-penanam modal dapat berupa pembebasan atau keringanan pajak penghasilan, bea masuk atas impor barang modal, keringanan pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Pemberian fasilitas tersebut dimaksudkan bukan untuk semua jenis industri yang ada. Pemberian fasilitas tentu didasarkan pada hasil pemetaan terhadap industri apa yang sesuai dan industri apa saja yang tidak sesuai untuk diberikan fasilitas dalam rangka meningkatkan arus masuk investasi ke Indonesia. Misalnya, berdasarkan hasil pemetaan tentang industri yang ada di Indonesia, maka fasilitas diberikan kepada penanam-penanam modal yang membangun industri di daerah tertinggal, industri yang menunjang pembangunan infrastruktur, industri yang melakukan alih teknologi, industri yang menggunakan barang modal yang diproduksi di dalam negeri, atau industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Pemberian fasilitas tersebut tentu dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Implementasi kedua dari kebijakan perbaikan iklim investasi adalah pemberian kemudahan kepada penanam-penanam modal. Pemberian kemudahan kepada penanam-penanam modal dapat berupa kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi tentang potensi dan peluang penanaman modal di pusat maupun di daerah, memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penanam-penanam modal berupa jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, dan lain sebagainya.

Bentuk kemudahan lainnya, juga dapat berupa pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam-penanam modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan dan pelayanan non perizinan. Jenis pelayanan perizinan dapat berupa percepatan pemberian perizinan pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, dan izin-izin lainnya. Jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya dapat berupa fasilitas bea masuk atas impor berbagai mesin, fasilitas bea masuk atas impor berbagai jenis barang dan bahan, dan lain sebagainya.

Di samping fasilitas dan kemudahan, kebijakan perbaikan iklim berinvestasi dapat juga dilakukan melalui pemberian insentif. Bentuk insentif yang dapat diberikan kepada badan usaha penanaman modal seperti pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Penanaman modal (asing dan domestik) telah menjadi faktor yang memainkan peranan utama sebagai penentu tingkat pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Oleh karenanya, peranan investasi sangat penting dalam mencapai target pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Peranan investasi dapat terwujud jika permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan birokrasi, *grease money*, dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menghambat iklim berinvestasi segera di atasi.

Iklim berinvestasi dapat diperbaiki dengan melakukan berbagai kebijakan, yaitu: (a) kebijakan perbaikan kelembagaan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi antara peraturan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai iklim berinvestasi, (b) kebijakan reformasi di bidang pelayanan investasi, seperti: penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, transparansi biaya perijinan, dan menjadikan para birokrat menjadi fasilitator bagi dunia bisnis, dan (c) kebijakan yang berhubungan dengan kepabeanaan dan cukai, ketenagakerjaan, dan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memperbaiki iklim berinvestasi dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan perbaikan iklim berinvestasi melalui pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal (asing dan domestik) sehingga modal investasi tersedia dalam mencapai target pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif tentu dilakukan berdasarkan hasil pemetaan terhadap kondisi industri di Indonesia.

DAFTAR LITERATUR

- Basar, Adhy. 2007. *Kebijakan Investasi Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi*, Economic Review No. 208.
- Hofman, B., Kai, K. and Gunther, G.S. 2003. *Corruption and Decentralization*. International conference on 'Decentralization and its Impact on Local Government and Society'. May 15-17.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005, Menanti Reformasi Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia, Makalah dalam "Diskusi Panel Ahli Kompas", Harian Kompas, Gedung Gramedia Unit III antai 5, Jakarta Pusat, 24 Januari 2005.
- LPEM, 2000. *Construction of Regional Index of Cost of Doing Business in Indonesia*. Jakarta
- Silalahi, Donalson., Pasaman Silaban., Edison P. Hutaauruk., Ramses Simanullang. 2009. *Dampak Investasi Terhadap Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian di Sumatera Utara*, Jurnal manajemen dan Bisnis, Vol. 9. No.2, September.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Swasembada, 2004. "Apa Siapa Macam-macam Bisnis Daerah", Edisi Khusus, No 8/XX/15-28 April.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan. 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan. 2007. *Pembangunan Industri Nasional sejak Era Orde Baru Hingga Pasca Krisis*, Jakarta: Trisakti Press.
- Tambunan, Tulus. 2007. *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing*, Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti & Kadin Indonesia, Makalah pada Seminar Bank Indonesia 19 Desember 2007, Jakarta.
- UNCTAD, 2006. *World Investment Report 2006*, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Investment
- WEF, 2007. *The Global Competitiveness Report 2007-2008*, Geneva: World Economic Forum.
- World Bank, 2003. *Indonesia Maintaining Stability, Deepening Reforms*.